

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 5.1 Kesimpulan

a. Aktualisasi modal sosial masyarakat Jakarta dalam penanganan sampah plastik di Teluk Jakarta dapat dibagi menjadi tiga menurut sifatnya, yaitu modal sosial bonding, bridging, dan linking.

Pada aspek bonding, dominan didasarkan pada adanya kesamaan latar belakang umumnya warga Jakarta hidup berhimpitan dan rumah tidak mempunyai halaman, tempat yang biasanya untuk mengubur sampah. Demikian juga, penduduk DKI Jakarta sebagian besar adalah kelompok masyarakat menengah ke bawah. Pada kelompok ini, umumnya masih menghadapi himpitan ekonomi ditengah tingginya biaya hidup di Kota Metropolitan. Program Bank Sampah menjadi alternatif untuk menambah pendapatan. Selanjutnya adalah kepatuhan pada ajaran agama.

Pada aspek *bridging*, adalah dengan membentuk jaringan yang antara nasabah bank sampah unit, bank sampah induk, dan industri daur ulang. Selain itu membangun kerjasama antara lembaga TPST dengan kelompok masyarakat seperti Karang Taruna, kelompok komunitas di tiap kelurahan seperti kelompok Ibu-ibu PKK dan kelompok pengajian.

Sedangkan pada aspek *linking*, tampak pada program bank sampah dalam bentuk jaringan kerjasama antara Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat, Perusahaan air minum mineral kemasan (PT. Danone) dan perbankan nasional (BNI dan Bank Indonesia), kerjasama antara TPS Terpadu dengan kelompok masyarakat, organisasi dan perangkat pemerintahan dalam menjalin kesepakatan dan kerjasama. Program *Citizen*

*Relationship Management* dalam bentuk jaringan komunikasi dan informasi antara SKPD, UKPD, BUMD, Pemerintah Kota Administrasi dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jaringan informasi tersebut langsung terhubung dengan masyarakat melalui aplikasi *Citizen Relationship Management*. Pada program Samtama dalam bentuk jaringan antara perwakilan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dengan warga 22 RW di lokasi *Pilot Project*. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga membangun kolaborasi dengan badan usaha swasta untuk membantu melakukan pendampingan pemilahan sampah kepada warga dari aspek sosial hingga aspek teknis. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Osaka, Jepang tentang penanganan sampah terutama untuk pengolahan kembali sampah plastik melalui daur ulang.

Aktualisasi tersebut diimplementasikan melalui program Bank Sampah, Citizen Relation Management, SAMTAMA (Sampah Tanggung Jawab Bersama) dan Jakarta Recycle Center.

b. Efektivitas regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta terkait dengan penanganan sampah plastik yang ada di Teluk Jakarta

Sebagai respons dan tindak lanjut terhadap keberadaan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan beberapa seperti Perda, Pergub dan Instruksi Gubernur. Secara umum target nasional sebesar 70%, optimis dapat dicapai pada tahun 2023. Sementara itu dalam pelaksanaan aksi nasional untuk mengurangi sampah di laut sangat sulit, aksi ini harus secara kolaboratif melibatkan wilayah administrasi sekitar Jakarta, seperti Tangerang, Bekasi, Kerawang dan Provinsi Lampung. Partisipasi masyarakat juga harus terus

ditingkatkan, mengingat sikap warga Jakarta umumnya paham namun kurang peduli dalam dalam memperlakukan sampah.

c. Strategi yang dilakukan Pemerintah DKI Jakarta dalam memberdayakan modal sosial, meliputi tujuan (Ends) yaitu tercapainya peningkatan peran serta masyarakat (modal sosial) dan pelaku usaha (swasta, BUMN/BUMD) untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan dan sampah menjadi sumber daya yang memiliki nilai ekonomis. Adapun caranya (Ways) adalah dengan pengurangan sampah di sumber, Optimalisasi Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang dan pembangunan *Intermediate Treatment Facility* (ITF). Sedangkan sarana (Means) yang digunakan melalui Kelembagaan, Pendanaan, dan Masyarakat / swasta / perguruan tinggi

## **5.2 Rekomendasi**

a. Mohon dilakukan sinergi antara pemerintah pusat (kementerian Koordinator Maritim dan Investasi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam program penanganan sampah di Teluk Jakarta sehingga kegiatan penanganan sampah plastik di DKI Jakarta dapat berjalan dengan lebih efisien.

b. Bagi stakeholder keamanan lingkungan maritim, dalam penyusunan kebijakan yang melibatkan masyarakat, mohon agar mempertimbangkan aspek modal sosial terutama jika kebijakan tersebut menyangkut kelembagaan, pendanaan, dan masyarakat/swasta/perguruan tinggi.

c. Perlunya penelitian lanjutan, terutama dalam aspek kolaborasi pemerintah daerah sekitar DKI Jakarta dalam penanganan sampah di Teluk Jakarta.